

**NOTULENSI
DISKUSI PERENCANAAN ANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA
PADA PEMERINTAH PUSAT (APBN)**

**Lt. 3 Sekretariat MPBI, Jakarta
Sabtu, 15 Mei 2010, Pukul 13.00 – 15.30 WIB**

PEMBUKAAN

**Djuni Pristiyanto, MPBI
Koordinator Kegiatan**

- Diskusi perencanaan anggaran penanggulangan bencana (PB) pada pemerintah pusat (APBN) ini merupakan awal dari serangkaian “Diskusi Pengembangan Wacana PB” di MPBI pada tahun 2010-2011.
- MPBI bercita-cita berperan sebagai mata air pengetahuan dan praktik PB yang tiada habis kepada para pelaku dan pemerhati PB. Dan salah satu bentuk dari mata air itu adalah dilakukannya Diskusi Pengembangan Wacana PB ini.
- Topik-topik diskusi pada tahun 2010-2011 antara lain:
 - ❖ Mei – Juni 2010 Topik: Anggaran PB.
 - ❖ Juli – September 2010 Topik: Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK)
 - ❖ Oktober – Desember 2010 Topik: Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - ❖ Januari – Maret 2011 Topik: Kerelawanan (*volunteerism*)
 - ❖ April - Juni 2011 Topik: Mitigasi Bencana
 - ❖ Juli - September 2011 Topik: Sistem Peringatan Dini
 - ❖ Oktober – Desember 2011 Topik: Tanggap Darurat
- Pada diskusi bulan Mei – Juni 2010 dengan topik anggaran PB itu masih dibagi-bagi lagi menjadi subtopik-subtopik sebagai berikut:
 - ❖ Sabtu, 15 Mei 2010: Perencanaan anggaran PB pada pemerintah Pusat. Narasumber: Rinto Andriono, IDEA (sudah berlangsung).
 - ❖ Kamis, 27 Mei: Perencanaan anggaran PB pada pemerintah daerah. Narasumber: Pak Anung Sugihantono (belum konfirm) dan Didik Mulyono, Oxfam (sudah konfirm).
 - ❖ Kamis, 10 Juni: Penganggaran PB oleh BNPB. Narasumber: Pak Fatchul, Kabiro Perencanaan BNPB (sudah konfirm bisa).
 - ❖ Kamis, 24 Juni: Penganggaran PB oleh BPBD. Narasumber: BPBD Prov Jateng dan Mas Banu (belum konfirm).
- Hasil-hasil diskusi Anggaran PB pada bulan Mei-Juni 2010 ini akan dikumpulkan dan dijadikan satu sebagai bahan guna menyusun kertas posisi anggaran PB. Penyusunan kertas posisi anggaran PB itu rencananya akan dilakukan pada Minggu Pertama bulan Juli 2010.

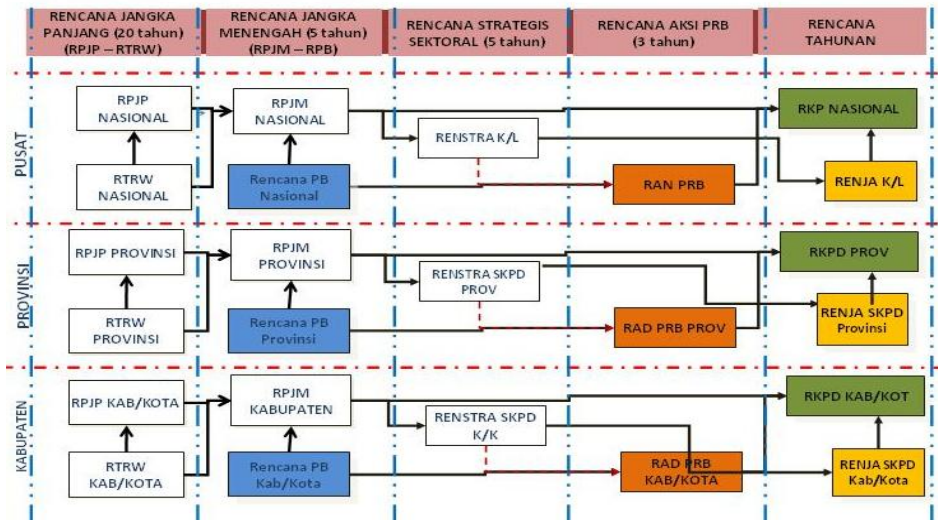
PAPARAN MATERI

Rinto Andriano, Perhimpunan IDEA

Perencanaan Anggaran PB Nasional: Pemantik Diskusi Alokasi Sumber Daya Publik untuk PRB

- Perencanaan anggaran PB secara nasional harus diletakkan dalam konteks “kerangka koordinasi sistem perencanaan pembangunan dengan RPB dan RAD PRB” sebagai berikut:

Kerangka Koordinasi Sistem Perencanaan Pembangunan dengan RPB dan RAD PRB



- Komponen dalam APBN: Belanja APBN
 - Belanja Pemerintah Pusat (pegawai, barang, modal dan bantuan sosial)
 - Belanja K/L
 - Dekonsentrasi
 - Dana Perimbangan ke Daerah
 - DAU, DAK, hibah

Isu-isu Relevan

- ❖ Pemaduan
 - Pemaduan Renas PB dan RAN PRB, Renja dan RKA K/L
 - Strategi untuk merespon shortage anggaran PB
- ❖ Dana Perimbangan
 - Peningkatan tidak signifikan bagi daerah
 - Mayoritas daerah risiko bencana tinggi bukan daerah kaya PAD
- ❖ Dana Dekonsentrasi
 - Potensial merespon kebutuhan PB Daerah
 - Akuntabilitas rendah dan relevansi dengan peta risiko daerah rendah
- ❖ Program Spesifik
 - Hanya untuk pencarian dan penyelamatan
 - Nilainya Rp 348 Miliar.

Isu-isu Relevan



- Prioritas dalam Rencana Nasional PB
 - ❖ Penguatan kerangka regulasi PB.
 - ❖ Pemaduan PB dalam perencanaan pembangunan.
 - ❖ Pemberdayaan perguruan tinggi.
 - ❖ Penanggulangan bencana berbasis masyarakat.
 - ❖ Pembentukan Satuan Reaksi Cepat PB
 - ❖ PRB untuk kelompok kebutuhan khusus
 - ❖ Peningkatan peran LSM, dunia usaha dan organisasi mitra pemerintah.
- Rinto menganalisis Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2010 dan memilah dana-dana yang masuk ke dalam atau terkait dengan isu PB. Dari hasil analisis Rinto pada RKP 2010 khusus pada bagian BNPB ada temuan di bawah ini.
- **Penanggulangan Bencana dalam Prioritas RKP 2010: Sasaran peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan kapasitas adaptasi perubahan iklim.**
 1. Meningkatnya kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan bencana alam.
 2. Meningkatnya pelaksanaan rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam.
 3. Meningkatnya pengelolaan DAS di 18 unit DAS dan meningkatnya pengelolaan irigasi.
 4. Meningkatnya upaya pengelolaan sumber daya kelautan.
 5. Meningkatnya operasionalisasi RTRWN, RTR Pulau, RTRWP, RTR Kab/Kota.
- Anggaran BNPB
 - ❖ Total anggaran Rp 222,062 Milyar.
 - ❖ Belanja pegawai Rp 11,03 Milyar
 - ❖ Belanja barang Rp 132,8 Milyar
 - ❖ Belanja modal Rp 14,9 Milyar
 - ❖ Belanja hibah Rp 19 Milyar
- Anggaran Spesifik PB
 - ❖ Program pencarian dan penyelamatan Rp 348,402 Milyar (dilakukan oleh BNPB).
 - ❖ Belanja barang Rp 6,796 Milyar, Belanja modal Rp 341,606 Milyar.
 - ❖ Lebih terfokus pada pengadaan kendaraan untuk pencarian dan penyelamatan, tidak memadai jika diandalkan untuk merespon kebutuhan PB nasional.
 - ❖ Program pemulihan daerah yg terkena bencana nasional Rp 169,269 Milyar (dilakukan oleh Bappenas).
 - ❖ Ada 3 komponen: pengembangan sistem manajemen PB nasional, penanggulangan pasca bencana alam dan kerusakan sosial, monitoring pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
 - ❖ Program ini terbatas mengintervensi kebutuhan pasca bencana, padahal komponen pengembangan sistem PB dibutuhkan justru sebelum bencana.
- Contoh Program-Program Lain yang Potensial Relevan untuk PRB
 - ❖ Program peningkatan ketahanan pangan Rp 3,008 Trilyun
 - ❖ Program upaya kesehatan masyarakat Rp 2,010 Trilyun
 - ❖ Program pengembangan konservasi danau dan sumber daya air Rp 2,229 Trilyun
 - ❖ Program penataan adminduk Rp 494,133 Milyar
 - ❖ Program peningkatan kerjasama antar daerah Rp 9,2 Milyar
 - ❖ Program pengendalian pencemaran Rp 910 Juta.
 - ❖ Program penataan ruang Rp 2, 283 Trilyun
- Dalam RKP 2010 program BNPB hanya ada satu, yaitu “Program pencarian dan penyelamatan”. Hal ini mungkin disebabkan karena:
 - ❖ Paradigma BNPB masih berupa respon (emergency).
 - ❖ BNPB tidak dapat menyakinkan K/L, khususnya Bappenas dan Kementerian Keuangan sehingga hanya ada satu program itu yang disetujui.
- Sebenarnya bila BNPB berniat untuk mengoptimalkan fungsi dan koordinasinya, yaitu memanfaatkan anggaran yang ada pegawai dan koordinasi anggaran pada K/L yang lain. Lihat pada bagian: “Contoh Program-Program Lain yang Potensial Relevan untuk PRB” di atas.
- Dana on call adalah dana cadangan yang sudah ditetapkan jumlahnya. Dana on call ini ada di Kementerian Keuangan dan dapat keluar dengan otorisasi dari BNPB.
- Regulasi mengenai perencanaan anggaran masih banyak konflik antar peraturan.

DISKUSI

- Dalam Renstra BNPB isu strategis yang paling banyak adalah pada aspek kedaruratan. Dalam struktur BNPB sudah ada untuk pengurangan risiko bencana, tapi dalam pelaksanaannya belum berjalan.
- Dari program BNPB yang hanya satu itu berupa “Program pencarian dan penyelamatan” maka dapat dilihat bahwa paradigma BNPB adalah respon (emergency). Pertanyaannya adalah:
 - ❖ Apakah BNPB menyadari bila paradigmanya masih berupa respon (emergency)?
 - ❖ Apakah BNPB menyadari bila dia lemah dalam melakukan koordinasi dengan K/L lainnya?
 - ❖ Bagaimana membantu BNPB dalam hal ini?
- Untuk implementasi penyelenggaraan PB harusnya ada “Peta Jalan atau *Road Map*” PB. Ini sebagai peta untuk memperjelas posisi, peran, pelaku dan kondisi aktual PB. Pak Sugeng Triutomo sudah membuat “sistem PB”, tapi masih dalam taraf awal sehingga belum digunakan sebagai “peta jalan”.
- Dalam Rencana Nasional (Renas) PB 2010-2014 sudah berada di jalur yang benar. Harusnya Renstra BNPB disesuaikan dengan Renas PB tersebut.
- Sumber daya manusia di BNPB dan prosedur standar operasional (atau standard operational procedure – SOP) ..
- Harusnya prioritas-prioritas program BNPB masuk ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA).
- Usulan agar dilakukan:
 - ❖ Evaluasi penyelenggaraan PB, baik di tingkat nasional maupun daerah.
 - ❖ Peninjauan (*review*) terhadap regulasi terkait PB.
 - ❖ Peninjauan (*review*) kelembagaan PB, baik di tingkat nasional maupun daerah.
- Sudah ada inisiatif-inisiatif yang dapat “dimanfaatkan” untuk membahas usula-usulan di atas, seperti:
 - ❖ Kelompok Kebijakan pada Convergen Group untuk pembahasan regulasi terkait PB.
 - ❖ Kelompok evaluasi pelaksanaan HFA tahun 2010 pada Convergen Group untuk pembahasan evaluasi penyelenggaraan PB.

LAIN-LAIN

- Peran dan fungsi Unsur Pengarah BNPB dalam praktik.
- Pak Sugimin adalah salah satu anggota dalam Unsur Pengarah BNPB tapi kini menjabat Tim Pendukung Teknis (TPT) Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi Sumatera Barat. Harusnya Unsur Pengarah tidak melakukan implementasi.
- Dalam praktiknya TPT Rehab Rekons Prov Sumbar lebih bersifat fisik, rekomendasi-rekomendasi TPT tidak dijalankan oleh Pemerintah Daerah.
- Di Kota Padang ada BPBD Kota Padang dan badan pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi secara khusus.
- Di Provinsi NTT ada BPBD Provinsi NTT dan Badan Kesbanglinmas yang menjalankan kegiatan-kegiatan PB.

Acara	Notulensi Diskusi Perencanaan Anggaran Penanggulangan Bencana pada Pemerintah Pusat (APBN)
Tempat	Lt. 3 Sekretariat MPBI, Jakarta
Hari, tanggal	Sabtu, 15 Mei 2010
Pukul	13.00 – 15.30 WIB
Narasumber	Rinto Adriono, IDEA
Moderator	Djuni Pristiyanto
Notulis	Djuni Pristiyanto

**DAFTAR PESERTA
DISKUSI PERENCANAAN ANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA
PADA PEMERINTAH PUSAT (APBN)**

**Lt. 3 Sekretariat MPBI, Jakarta
Sabtu, 15 Mei 2010, Pukul 13.00 – 15.30 WIB**

No	Nama	Lembaga	Alamat	Email
1	Rinto Andriono (narasumber)	IDEA	Jl. Kaliurang KM 5, Gg. Tejomoyo CT III/3 Yogyakarta 55281 Telp/Fax 0274-583900 Email idea@ideajogja.or.id Website: http://www.ideajogja.or.id	rinto.andriono@gmail.com
2	Wawan Budianto	READY	Kabupaten Mentawai, Sumatera Barat	benoa.langitbiru@gmail.com , Ind.greenland@yahoo.com
3	Wijayanto, S.Pi, M.Sc (anggota MPBI)	Asian Institute of Technology Center In Indonesia (AIT CI)	Jln. Abdul Hamid - Cicaheum, Bandung - Jawa Barat Website : http://www.aitci.ac.id Phone : 022-7236400 Fax : 022-7236399	wijayanto@gmail.com , wijayanto@aitci.ac.id
4	P. Amalia Siregar (Ipoet)	DMRI – Komunitas, LSM Bina Eka Lestari	Jl. Parangpong Pos 13 Kab. Lembang. Jl. Setiabudi No. 438 Bandung	ipoet.tim@gmail.com , dmri.community@gmail.com
5	Kurniawan Zulkarnain	HP2M		Kurniawan.Zulkarnain@undp.org
6	Titi Moektijasih (anggota MPBI)	UN Office for the Coordination and Humanitarian Affairs - Indonesia (UN-OCHA)	Menara Thamrin Lt. 10. Jl. MH. Thamrin Kav.3, Jakarta 10250 Telp: 021-3141308 ext.149, Fax: 021-31900003, Website: http://ochaonline.un.org/indonesia/Home/tabid/3305/language/en-US/Default.aspx	moektijasih@un.org
7	Thres Sanctyeka	<i>Microinsurance PPP Coordinator Public Private Partnerships (PPP)</i> gtz Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH	Bank Indonesia Menara Radius Prawiro 2nd Fl. Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, INDONESIA T: +62 21 386 6384 M: +62 819 317 617 27 F: +62 21 2354 9156 E-mail to: thres.sanctyeka@gtz.de I: www.gtz.de/ppp	thres.sanctyeka@gtz.de
8	Patricius Usfomeny	OXFAM GB	Jl. Taman Margasatwa no 26 Pasar Minggu, Ragunan Jakarta Selatan	pusfomeny@oxfam.org.uk
9	Djuni Pristiyanto (anggota MPBI)	MPBI	Jl. Kebon Sirih No. 5G Jakarta Pusat	belink2006@yahoo.com.sg , djuni@mpbi.org
10	Faisal Djalal (anggota MPBI)	MPBI	Jl. Kebon Sirih No. 5G Jakarta Pusat	faisal.djalal@gmail.com